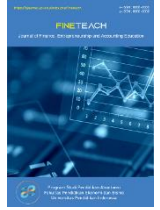




# Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan pada Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tasikmalaya

<sup>1</sup>Sembi Semruwati, <sup>2</sup>Asep Kurniawan, <sup>3</sup>Arvian Triantoro

<sup>123</sup>Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,  
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia  
Correspondence: E-mail: [sembisemruwati99@upi.edu](mailto:sembisemruwati99@upi.edu)

### ABSTRACT

This study aims to determine the description and influence of the internal control system and compliance with legislation on the quality of local government financial reports. The theory in this study uses Good Governance Theory. This study uses quantitative research methods with a descriptive verification approach. The research population is all the financial and asset subsections of each department and agency of the Tasikmalaya Regency OPD. The sampling method uses a total sample technique, namely there are 64 samples from the entire population. Data collection techniques to obtain primary data using survey techniques in the form of distributing and filling out questionnaires. The analysis method used is validity test, normality test, prerequisite test, and hypothesis testing using multiple linear regression. Based on the results of this study, it can be concluded that (1) The description of the Internal Control System in the Tasikmalaya Regency Local Government Organisation is in a very good classification (2) The description of Compliance with Legislation in the Tasikmalaya Regency Local Government Organisation is in a very good classification (3) The description of the Quality of Government Financial Statements in the Tasikmalaya Regency OPD is in a very good classification (4) The Internal Control System has a positive effect on the Quality of Government Financial Statements, and (5) Compliance with Legislation has a positive effect on the Quality of Government Financial Statements.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 1 November 2023

First Revised 1 Februari 2024

Accepted 10 March 2024

First Available online 30 April 2024

Publication Date 30 April 2024

#### Keyword:

Internal Control System, Compliance with Legislation, Quality of Financial Statements.

## 1. INTRODUCTION

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola sumber keuangan daerahnya. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan cerminan bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan ini akan di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mengeluarkan empat penilaian opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Opini yang diberikan oleh BPK-RI untuk pemerintah daerah mengalami peningkatan. Menurut IHPS dari tahun 2018 sampai dengan 2021 hasil pemeriksaan keuangan laporan mengalami peningkatan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menyebutkan bahwa opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami perbaikan tiap tahunnya dan telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah. Namun, temuan masalah yang selalu ada dan selalu terulang yaitu sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada perundang-undangan.

Tabel 1 Rekap Temuan Masalah Hasil Pemeriksaan LKPD

Total/Tahun	2021	2020	2019	2018
Masalah	11.910	11.662	10.499	12.117
SPI	5.366	5.367	5.175	5.858
Kepatuhan	6.544	6.295	5.324	6.259
Kerugian	2.885	2.645	2.147	2.642

Sumber: Data diolah peneliti

Peningkatan temuan masalah dan kerugian finansial yang nyata akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah ditemukan mengenai sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu dari beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dari tahun 2018 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengalami peningkatan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara terus menerus. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan berarti tidak ditemukan pelanggaran terhadap keharusan dan kepatuhan laporan keuangan tersebut.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat beberapa pembayaran yang tercantum di laporan keuangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya, yang akan ada kerugian yang akan dialami, apabila tidak diselesaikan. Dan juga belum tentu masyarakat merasakan manfaatnya seperti proyek fasilitas umum yang mangkrak. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tasikmalaya tahun 2022 memperoleh nilai B (78,019) yang artinya masih perlu perbaikan. Jika tidak segera diatasi maka berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan yang akan

menyebabkan kerugian, terjadinya kecurangan, dan kekeliruan Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian pemerintah masih belum dijalankan secara optimal, yang memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan yang luput dari pengawasan.

Untuk menyelesaikan masalah diatas, penelitian ini menggunakan teori Good Governance atau tata kelola pemerintah yang baik, yaitu tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari, nilai disini merupakan nilai baik. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance yaitu akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada perundang-undangan merupakan sebuah sikap yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintah yang akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Solehah, 2021) dan (Lestari, 2020), menyatakan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, menyatakan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan menurut (Srisilia Nikita, et al., 2020) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Untuk penelitian terdahulu kepatuhan pada perundang-undangan menurut (Srisilia Nikita, et al., 2020) dan (Pertiwi, 2021) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan menurut (Setiawan & Mediaty, 2017) menyatakan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh pada pemberian opini laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap, yang menandakan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada perundang-undangan masih tidak konsisten, dan masalah yang terjadi saat ini masih harus dicari jalan keluarnya dan segera ditindaklanjuti.

## **2. METHODS**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Pada pendekatan deskriptif akan memberikan gambaran umum mengenai data yang telah terkumpulkan mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kepatuhan pada Perundang-undangan terhadap Laporan Keuangan. Dan pada pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh apakah terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kepatuhan pada Perundang-undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah sub bagian keuangan dan aset setiap dinas di Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel total. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknis

analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis uji f dan uji t dengan bantuan program komputer SPSS.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### Analisis Deskriptif

Tabel 3.1 Hasil Analisis Tanggapan Responden untuk Variabel SPI

No.	Dimensi/Indikator	Persentase	Kategori
1	Lingkungan Pengendalian	87,19	Baik Sekali
2	Penilaian Risiko	85,94	Baik Sekali
3	Kegiatan Pengendalian	82,81	Baik
4	Informasi dan komunikasi	84,84	Baik
5	Pemantauan Pengendalian Internal	87,5	Baik Sekali
Rata-Rata		85,66	Baik Sekali

*Sumber: Data primer diolah oleh peneliti*

Tabel 3.2 Hasil Analisis Tanggapan Responden untuk Variabel Kepatuhan

No.	Dimensi/Indikator	Persentase	Kategori
1	Kerugian	78,75	Baik
2	Potensi Kerugian	83,13	Baik
3	Kekurangan Penerimaan	94,69	Baik Sekali
4	Temuan Administratif	92,81	Baik Sekali
5	Ketidakhematan	86,56	Baik Sekali
6	Ketidakefisienan	87,19	Baik Sekali
7	Ketidakefektifan	91,56	Baik Sekali
Rata-Rata		87,81	Baik Sekali

*Sumber: Data primer diolah oleh peneliti*

Tabel 3.3 Hasil Analisis Tanggapan Responden untuk Variabel Kualitas LKPD

No.	Dimensi/Indikator	Persentase	Kategori
1	Relevan	89,85	Baik Sekali
2	Andal	93,65	Baik Sekali
3	Dapat dibandingkan	93,44	Baik Sekali
4	Dapat dipahami	95,47	Baik Sekali
Rata-Rata		93,10	Baik Sekali

*Sumber: Data primer diolah oleh peneliti*

Berdasarkan tabel 3.1 secara keseluruhan sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan sangat baik antara pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya dalam kegiatan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi, meningkatkan keandalan, dan integritas finansial dalam

melindungi asset dan meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan. Tabel 3.2 Secara keseluruhan dimensi ketidakpatuhan semakin berkurang. Dapat diartikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah memenuhi kepatuhan pada perundang-undangan oleh instansi pemerintah kabupaten tasikmalaya sesuai dengan standar yang sudah ada. Dan tabel 3.3 secara keseluruhan kualitas laporan keuangan pada indikator dapat dipahami memiliki persentase rata-rata pada penilaian baik sekali, artinya laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna secara umum.

### Analisis Regresi Berganda

Tabel 3.4 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585 <sup>a</sup>	.342	.320	2.794

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan, SPIP

*Sumber data diolah*

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.35 menunjukkan nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,342. Nilai tersebut berarti 34,2% perubahan pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal (X1) dan kepatuhan pada perundang-undangan (X2), sedangkan 65,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji F

Tabel 3.5 Uji F

#### ANOVA<sup>a</sup>

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	247.174	2	123.587	15.829	.000 <sup>b</sup>
	Residual	476.264	61	7.808		
	Total	723.437	63			

a. Dependent Variable: KualitasLKPD

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan, SPIP

*Sumber data diolah*

Berdasarkan pengolahan data menggunakan *software IBM SPSS* dihasilkan nilai  $F_{Hitung}$  sebesar 15,289 sedangkan nilai  $F_{Tabel}$  atau  $F(k: n-k)$  dengan  $\text{sig } \alpha = 0,05$ , yaitu  $F(2:62)$  sebesar 3,145 artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai  $F_{Hitung} > \text{nilai } F_{Tabel}$  yaitu  $15,289 > 3,145$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya regresi berarti. Maka model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk membuat kesimpulan.

## Uji t

Tabel 3.6 Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.319	4.038		7.014	.000
	SPIP	.110	.049	.291	2.230	.029
	Kepatuhan	.428	.155	.361	2.763	.008

a. Dependent Variable: KualitasLKPD

Berdasarkan pengolahan data menggunakan *software IBM SPSS* dihasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,230 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  atau  $t(a/2; n-k-1)$  dengan sig.  $\alpha = 0,05$  yaitu  $t(0,025;61)$  sebesar 2,000. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,230 > 2,000$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil ini berarti Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang baik akan memberikan pengaruh dan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya, berdasarkan pengolahan data menggunakan IBM SPSS dihasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,763 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  atau  $t(a/2; n-k-1)$  dengan sig.  $\alpha = 0,05$  yaitu  $t(0,025;61)$  sebesar 2,000. Artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,763 > 2,000$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil ini berarti Kepatuhan pada Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa Kepatuhan pada Perundang-undangan yang baik akan memberikan pengaruh dan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ketidakpatuhan berkurang, maka akan semakin tinggi kepatuhan.

Hal ini sejalan dengan teori *good governance*, sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada perundang-undangan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Karena tata pemerintahan yang baik memiliki karakteristik partisipasi, berorientasi pada masyarakat luas, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, dan patuh pada perundang-undangan. Salah satu dari tujuh prinsip terdapat akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas program dan kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan upaya pemerintah daerah selaku entitas akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, diungkap secara memadai, patuh pada perundang-undangan, dan sistem pengendalian internal yang efektif. Pelaporan keuangan juga harus transparan, bahkan harus secara online ini dimaksudkan sebagai upaya melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini, menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariefsetya Darmawan, 2018), (Christina Putri Pertiwi, 2020), (Intan Ayu Lestari, 2020), (Nur Fitri Dewi, 2017), (Setiawan & Mediaty, 2017),

(Rosi Solehah, 2021), dan (Nunung Sri Wahyuni, 2019) yang mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ditunjukkan dengan semakin baik pengendalian yang dilakukan maka semakin baik kualitas laporan yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil penelitian kepatuhan pada peundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Intan Ayu Lestari, 2020), (Christina Putri Pertiwi, 2021), dan (Nikita Srisilia, Hendrik et al., 2020) yang mengindikasikan kepatuhan pada perundang-undangan positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ditunjukkan dengan semakin baik kepatuhan yang dilakukan maka semakin baik pula kualitas laporan yang dihasilkan.

#### **4. CONCLUSION**

Gambaran Sistem Pengendalian Internal di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berada dalam klasifikasi baik sekali. Namun, pimpinan dan seluruh pegawai lebih mengkomunikasikan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan. Gambaran Kepatuhan pada Perundang-undangan di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berada dalam klasifikasi baik sekali. Namun, harus lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, memahami suatu ketentuan yang berlaku, lebih cermat, dan lebih teliti agar meminimalkan kerugian. Gambaran Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di OPD Kabupaten Tasikmalaya berada dalam klasifikasi baik sekali. Namun, hal yang harus diperhatikan lagi saat mengevaluasinya terutama laporan keuangan dimasa lalu. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten tasikmalaya. Semakin baik sistem pengendalian internal hal tersebut akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kepatuhan pada Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya. Semakin baik kepatuhan pada perundang-undangan hal tersebut akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **6. REFERENCES**

- Baridwan, Z. (2008). *Intermediate Accounting* (8th ed.). BPFE.
- Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276–288.
- BPK RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. IHPs SEMESTER I TAHUN 2022. September 2022.
- Darmawan, Ariefsetya. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. [Tidak diterbitkan]. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

- Defera, C. (2013). Pengaruh Sistem Kelemahan Intern Dan Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Penentuan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Universitas Atmajaya.
- Dewi, Nur Fitri. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang. Skripsi. [Tidak diterbitkan]. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Universitas Dipenogoro.
- Jatmiko, B., Prawoto, N., Astuti, R. J., Sari, R. N., & Ardhi, K. F. (2019). Application of Government Accounting Standards, Financial Statements Reporting, and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All SKPDs of Kulon Progo Regency Government). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 102(Icaf), 6–12.
- Kapp, R. (1978). Some Problem of Legal compliance audit. *The Bussines Lawyer*, 33(4), 2467–2472.
- Lestari, Intan Ayu. (2020). Pengaruh Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah, Efektifitas Pengendalian Internal Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan, dan Kepatuhan Perundang-Undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Pada Opini WTP Tahun 2018 dari BPK [Universitas Pancasakti Tegal]. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3203>
- Mahaputra, I. P. U. R., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Gianyar). *E-Junal Akuntansi*. Universitas Udayana Bali.
- Mardiasmo. (2005). Akuntansi Keuangan Dasar (Edisi Pert). BPFE UGM.
- Masmudi. (2003). Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. *Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, 3(1).
- Nunung, Sri Wahyuni. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara). [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2423>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dan Penyusunan laporan keuangan Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- Pertiwi, Christina Putri. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Dan Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Opd Kota Yogyakarta [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24006>



- Pratolo. (2017). Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Agustia, Y. P., & Suryani, E. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Pertam Setiawan, R. A., & Mediaty, M. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kepatuhan Terhadap Opini Laporan Keuangan Simposium Nasional Akuntansi XX, 1–20. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).
- Solehah, Rosi. (2021). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Skripsi. [Tidak diterbitkan]. Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Srisilia, Nikita, Hendrik, & Dhullo. (2020). Pengaruh Kepatuhan Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 260–268.
- Sukmaningrum, T., & Harto, P. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sumaryati, Novitasari, P., & Machmuddah. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statement Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802.